ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 1951 - 1956 | Volume 5 Nomor 5 Tahun 2026

Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mendukung Kebijakan Ekonomi Pertahanan

Informasi Naskah

Gede Arya Dewanatha[1]
Sri Sundari[2]
Sugeng Suryanto[3]

Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

dewanathaa@gmail.com[1]
sri.sundari@idu.ac.id[2]
sugengsuryanto66@gmail.com[3]

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan publik karena memengaruhi mutu pelayanan, keberlanjutan fungsi organisasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penyelenggaraan keimigrasian, gedung pelayanan, fasilitas tempat pemeriksaan imigrasi, infrastruktur perbatasan, dan perangkat teknologi informasi mendukung pelayanan serta pengawasan lalu lintas orang. Secara normatif, pengelolaan BMN dituntut berjalan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, keberadaan regulasi dan aplikasi administrasi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa aset telah digunakan secara optimal atau menghasilkan penghematan yang terukur. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efisiensinya, serta menjelaskan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi pertahanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan analisis kebijakan terhadap regulasi, dokumen resmi, dan literatur yang dapat ditelusuri. Analisis dilakukan dengan kerangka *Value for Money* yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa standardisasi kebutuhan melalui Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), penatausahaan digital, pemeliharaan berdasarkan kondisi, serta evaluasi pemanfaatan aset merupakan mekanisme yang berpotensi memperbaiki kinerja BMN. Akan tetapi, sumber yang dikaji belum cukup untuk menetapkan besaran penghematan aktual di Direktorat Jenderal Imigrasi. Efisiensi BMN dapat mendukung ekonomi pertahanan secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas alokasi sumber daya dan kesiapan layanan perbatasan; penghematan tidak otomatis menjadi tambahan anggaran pertahanan karena tetap bergantung pada mekanisme penganggaran negara.

Kata Kunci:
Efisiensi, Pengelolaan Barang Milik Negara, Kebijakan Ekonomi Pertahanan.

Abstract

State assets management is an important part of public financial governance because it affects service quality, organizational continuity, and the use of the State Budget (APBN). In immigration services, service buildings, immigration checkpoints, border facilities, and information technology support public services and the control of cross-border movement. Normatively, state assets must be managed in an orderly, effective, efficient, transparent, and accountable manner. However, the existence of regulations and administrative applications does not by itself demonstrate optimal asset utilization or measurable savings. This study examines state asset management mechanisms within the Directorate General of Immigration, identifies factors affecting efficiency, and explains their implications for defense economics policy. It uses a qualitative descriptive-analytical approach based on a literature review and policy analysis of traceable regulations, official documents, and academic literature. The analysis applies the Value for Money framework, comprising economy, efficiency, and effectiveness. The review indicates that needs standardization through the State Asset Needs Plan (RKBMN) and Goods and Needs Standards (SBSK), digital administration, condition-based maintenance, and asset-utilization reviews may improve asset performance. Nevertheless, the reviewed sources are insufficient to determine the actual amount of savings achieved by the Directorate General of Immigration. Efficient asset management may indirectly support defense economics by improving resource allocation and border-service readiness. Such efficiency does not automatically translate into additional defense appropriations, which remain subject to the state budgeting process.

Keyword:
Efficiency, State Asset Management, Defense Economics Policy.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan sumber daya publik yang harus dikelola berdasarkan kebutuhan organisasi dan manfaat yang dihasilkan sepanjang umur aset. Pengelolaan BMN karena itu tidak cukup dipahami sebagai pencatatan inventaris, tetapi juga mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan. Pendekatan sepanjang siklus hidup membantu

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

pemerintah menilai biaya kepemilikan secara menyeluruh serta menjaga agar aset tetap mendukung layanan dengan biaya yang wajar (OECD, 2025; World Bank, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 juga menjadi bagian dari kerangka pengelolaan BMN/Barang Milik Daerah yang menekankan tata kelola aset secara tertib dan optimal (Republik Indonesia, 2020).

Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang memiliki dimensi strategis, terutama pada tempat pemeriksaan imigrasi dan kawasan perbatasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 menempatkan penyelenggaraan keimigrasian dalam kerangka perlindungan dan penegakan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia (Republik Indonesia, 2011, 2024b). Dalam konteks tersebut, kondisi bangunan, perangkat pemeriksaan, jaringan teknologi informasi, dan sarana operasional dapat memengaruhi kesinambungan layanan serta kemampuan pengawasan.

Secara normatif, perencanaan kebutuhan BMN perlu didasarkan pada kebutuhan riil, standar yang berlaku, dan keterkaitan dengan penganggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 mengatur perencanaan kebutuhan BMN, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 mengatur Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mendukung integrasi proses pengelolaan keuangan satuan kerja, termasuk pencatatan aset. Kerangka tersebut menyediakan instrumen bagi perencanaan dan pengendalian yang lebih konsisten.

Dalam kondisi empiris, dokumen regulasi dan literatur yang ditelaah belum memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh unit keimigrasian telah mencapai tingkat utilisasi aset, ketepatan pemeliharaan, dan efisiensi biaya yang optimal. Sistem digital juga tidak otomatis menjamin kualitas data apabila pembaruan, rekonsiliasi, pemeriksaan fisik, dan pengendalian internal tidak dilakukan secara konsisten. Selain itu, kajian pustaka yang digunakan dalam artikel ini tidak memuat data biaya mikro yang telah diaudit, data kondisi aset per unit, ataupun pengukuran langsung waktu henti aset. Oleh sebab itu, perbedaan antara standar yang diharapkan dan hasil yang dapat dibuktikan menjadi persoalan utama penelitian ini.

Dari sudut pandang ekonomi pertahanan, pengelolaan sumber daya publik melibatkan pilihan alokasi, kelangkaan, dan biaya peluang. Sandler dan Hartley (1995) menjelaskan pentingnya analisis ekonomi dalam menilai pilihan dan penggunaan sumber daya pertahanan. Namun, efisiensi BMN pada fungsi keimigrasian tidak boleh disamakan dengan penghematan yang otomatis dapat dialihkan menjadi belanja pertahanan. Ruang fiskal dipengaruhi keberlanjutan fiskal dan keputusan anggaran pemerintah (International Monetary Fund [IMF], 2016). Hubungan yang lebih tepat adalah bahwa pengelolaan BMN yang baik dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan memperkuat kapasitas layanan negara, sementara realokasi anggaran tetap mengikuti mekanisme yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan: (1) bagaimana mekanisme pengelolaan BMN yang relevan untuk mendukung efisiensi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; (2) faktor apa yang memengaruhi pencapaian efisiensi pengelolaan BMN berdasarkan regulasi dan literatur yang ditelaah; dan (3) bagaimana efisiensi tersebut berimplikasi terhadap kebijakan ekonomi pertahanan, khususnya dukungan terhadap kesiapan layanan keimigrasian di wilayah perbatasan? Tujuan kajian adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara proporsional berdasarkan bukti yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis kebijakan, bukan melalui survei atau pengukuran langsung pada satuan kerja. Sumber kajian meliputi peraturan perundang-undangan terkait BMN dan keimigrasian, dokumen resmi pemerintah, publikasi lembaga internasional, serta artikel ilmiah yang relevan dengan manajemen aset publik, efisiensi belanja, dan ekonomi pertahanan. Periode dokumen utama yang ditelaah mencakup 2022–2025, dengan regulasi yang relevan hingga 2026 sebagai konteks kebijakan.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi ketentuan dan mekanisme yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta penghapusan BMN. Kedua, pengelompokan temuan ke dalam kerangka *Value for Money*: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga, interpretasi implikasi bagi ekonomi pertahanan dengan membedakan manfaat operasional yang dapat dijelaskan secara konseptual dari manfaat fiskal yang memerlukan bukti anggaran atau data biaya.

Keabsahan analisis dijaga melalui perbandingan antarsumber, pemeriksaan konsistensi antara regulasi dan literatur, serta pembatasan klaim sesuai bukti yang tersedia. Karena penelitian ini berbasis data sekunder dan tidak memiliki seri biaya mikro yang telah diaudit, artikel tidak menyatakan angka atau persentase penghematan aktual Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian merupakan sintesis kebijakan dan literatur;

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

pengujian kondisi faktual di masing-masing satuan kerja memerlukan data inventaris, kondisi aset, biaya operasi dan pemeliharaan, serta wawancara dengan pengelola BMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan BMN untuk Mendukung Efisiensi

Hasil telaah menunjukkan empat mekanisme utama yang berpotensi mendukung efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pertama, perencanaan kebutuhan harus menghubungkan kebutuhan operasional, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK), dan ketersediaan anggaran. PMK Nomor 153/PMK.06/2021 menyediakan kerangka perencanaan kebutuhan BMN, sedangkan PMK Nomor 138 Tahun 2024 menjadi rujukan standar barang dan standar kebutuhan. Penerapan standar dapat membantu menguji apakah jumlah, spesifikasi, dan lokasi aset sesuai dengan fungsi unit. Meski demikian, keberadaan standar belum cukup untuk membuktikan efisiensi tanpa data perbandingan antara kebutuhan, aset tersedia, dan realisasi pengadaan.

Kedua, penatausahaan digital dapat meningkatkan keterlacakan transaksi dan konsistensi informasi aset. SAKTI mengintegrasikan proses keuangan satuan kerja, tetapi mutu informasi tetap bergantung pada ketepatan input, pembaruan data, rekonsiliasi, serta kesesuaian catatan dengan kondisi fisik. Firmansyah dan Hollyson (2021) menyoroti relevansi sistem informasi, kompetensi pegawai, dan komitmen organisasi dalam kualitas pengelolaan BMN. Dengan demikian, digitalisasi perlu berjalan bersama pengendalian internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ketiga, pemeliharaan perlu diarahkan pada kondisi dan umur manfaat aset, bukan hanya dilaksanakan setelah kerusakan terjadi. Pendekatan sepanjang siklus hidup memungkinkan organisasi mempertimbangkan biaya operasi, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian secara lebih menyeluruh (OECD, 2025; World Bank, 2023). Untuk mengukur kinerjanya, unit kerja perlu memiliki catatan kondisi aset, riwayat gangguan, biaya pemeliharaan, waktu henti, dan status kesiapan operasional. Data tersebut tidak tersedia secara terperinci dalam sumber sekunder yang digunakan, sehingga efektivitas aktual pemeliharaan di lingkungan Ditjen Imigrasi belum dapat dinilai secara kuantitatif.

Keempat, aset yang tidak digunakan secara optimal perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan tugas dan fungsi, keamanan, biaya pengelolaan, dan peluang pemanfaatan sesuai ketentuan. Pemanfaatan BMN dapat menghasilkan manfaat ekonomi atau mengurangi biaya kepemilikan, tetapi tidak setiap aset yang tampak tidak terpakai layak dimanfaatkan pihak lain. Penetapan status aset, kebutuhan operasional masa depan, serta ketentuan hukum harus diperiksa sebelum keputusan dibuat. Klaim peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya dapat disampaikan jika didukung data penerimaan yang terdokumentasi.

Tabel 1. Mekanisme Evaluasi Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Negara

Mekanisme	Indikator yang perlu diperiksa	Kontribusi yang diharapkan	Batas bukti dalam kajian
Perencanaan RKBMN dan SBSK	Kesesuaian jumlah/spesifikasi aset dengan kebutuhan dan standar	Mengurangi risiko pengadaan berlebih atau tidak sesuai fungsi	Belum tersedia data pembanding kebutuhan dan realisasi per unit
Penatausahaan digital	Kelengkapan data, rekonsiliasi, kesesuaian catatan dan fisik	Meningkatkan keterlacakan dan kualitas keputusan	Keberadaan aplikasi tidak membuktikan kualitas data aktual
Pemeliharaan berbasis kondisi	Biaya pemeliharaan, frekuensi kerusakan, waktu henti, kesiapan aset	Menjaga keandalan layanan dan mengendalikan biaya siklus hidup	Tidak ada seri biaya mikro dan kondisi aset yang diaudit
Evaluasi pemanfaatan aset	Tingkat utilisasi, biaya kepemilikan, legalitas, realisasi PNBP	Mengurangi aset tidak produktif dan mengoptimalkan manfaat	Potensi manfaat belum sama dengan penerimaan yang terealisasi

Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Pengelolaan BMN

Berdasarkan regulasi dan literatur yang ditelaah, efisiensi pengelolaan BMN dipengaruhi oleh keterpaduan perencanaan dan penganggaran, kualitas data aset, kompetensi pengelola, pengendalian internal, serta konsistensi pemeliharaan. Perencanaan yang tidak didukung data kebutuhan dan kondisi aset berisiko menghasilkan pengadaan yang kurang tepat. Sebaliknya, data yang akurat membantu membedakan kebutuhan penggantian, pemeliharaan, redistribusi, dan penghapusan. Oleh karena itu, keputusan aset sebaiknya didasarkan pada informasi mengenai fungsi, lokasi, kondisi, nilai, biaya, dan tingkat pemanfaatan.

Faktor kelembagaan juga penting. Sistem digital merupakan sarana, sedangkan hasilnya bergantung pada disiplin proses, pembagian tanggung jawab, dan kompetensi pengguna. Kajian Firmansyah dan Hollyson (2021) mengaitkan kualitas pengelolaan BMN dengan sistem informasi, kompetensi pegawai, dan komitmen

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

organisasi. Sementara itu, Nurhani dan Zen (2023) membahas keterkaitan efisiensi belanja modal dan pemeliharaan dengan kualitas pengelolaan BMN. Literatur tersebut mendukung perlunya mengukur bukan hanya besaran belanja, melainkan juga apakah belanja menghasilkan aset yang berfungsi dan layanan yang diperlukan.

Dalam layanan perbatasan, kebutuhan aset juga dipengaruhi lokasi, intensitas layanan, kondisi geografis, ketersediaan utilitas, dan risiko operasional. Karena itu, standardisasi tidak seharusnya dimaknai sebagai penyamarataan seluruh unit tanpa memperhatikan konteks. SBSK dan RKBMN perlu menjadi dasar pembanding yang kemudian dilengkapi analisis kebutuhan spesifik lokasi. Kajian Manurung et al. (2024) mengenai integrasi sistem keimigrasian dan analisis penumpang menunjukkan relevansi interoperabilitas data untuk mendukung identifikasi risiko. Namun, kajian tersebut berfokus pada sistem informasi penumpang dan tidak dapat dijadikan bukti langsung mengenai efisiensi BMN fisik.

Analisis Efisiensi dengan Kerangka Value for Money

Kerangka *Value for Money* membantu membedakan tiga pertanyaan evaluasi. Aspek ekonomi menilai apakah sumber daya diperoleh dengan biaya dan spesifikasi yang wajar. Aspek efisiensi membandingkan sumber daya yang digunakan dengan keluaran yang dihasilkan. Aspek efektivitas menilai sejauh mana keluaran tersebut mendukung tujuan layanan dan pengawasan. Dengan kerangka ini, penurunan belanja tidak otomatis disebut efisien apabila menyebabkan penurunan kesiapan aset atau kualitas pelayanan.

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Pengukuran Efisiensi Pengelolaan BMN Berdasarkan Kerangka *Value for Money*

Dimensi	Pertanyaan evaluasi	Contoh indikator BMN keimigrasian
Ekonomi	Apakah aset diperoleh sesuai kebutuhan, spesifikasi, dan biaya yang wajar?	Kesesuaian RKBMN/SBSK; harga perolehan; kesesuaian spesifikasi
Efisiensi	Apakah aset menghasilkan keluaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal?	Tingkat utilisasi; biaya pemeliharaan per aset; waktu henti; biaya operasi
Efektivitas	Apakah aset mendukung pencapaian tujuan layanan dan pengawasan?	Kesiapan operasional; kontinuitas layanan; gangguan layanan yang terkait aset

Indikator di atas merupakan usulan pengukuran, bukan hasil pengukuran empiris dalam penelitian ini. Pengujian lebih lanjut memerlukan data aset per satuan kerja serta periode pembanding yang konsisten. Penggunaan indikator juga perlu memperhatikan karakteristik masing-masing aset; misalnya, aset cadangan yang jarang digunakan tidak serta-merta merupakan aset tidak efisien apabila keberadaannya memang diperlukan untuk menjaga kesinambungan layanan.

Implikasi terhadap Kebijakan Ekonomi Pertahanan

Dalam perspektif ekonomi pertahanan, efisiensi BMN merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas penggunaan sumber daya publik yang terbatas. Sandler dan Hartley (1995) menempatkan pilihan alokasi dan biaya peluang sebagai bagian penting analisis ekonomi pertahanan. Aset keimigrasian yang terpelihara dan tersedia dapat mendukung pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Fungsi tersebut relevan dengan kapasitas negara di wilayah perbatasan, sehingga kualitas BMN dapat dipandang sebagai faktor pendukung pertahanan nirmiliter dan ketahanan nasional.

Implikasi fiskalnya perlu dibedakan dari implikasi operasional. Efisiensi dapat mengurangi kebutuhan pengeluaran yang tidak perlu, menghindari pengadaan berulang, dan memperbaiki perencanaan biaya sepanjang umur aset. Namun, pengurangan biaya pada satu unit atau program tidak dengan sendirinya meningkatkan pagu anggaran pertahanan. Sebagaimana dijelaskan IMF (2016), ruang fiskal bergantung pada kondisi fiskal dan pilihan kebijakan pemerintah. Penghematan hanya dapat dialokasikan untuk prioritas lain melalui proses perencanaan, penganggaran, dan persetujuan yang berlaku.

Dengan demikian, hubungan antara efisiensi BMN keimigrasian dan ekonomi pertahanan lebih tepat dipahami sebagai hubungan tidak langsung. Jalur kontribusinya meliputi: (1) pengendalian biaya dan peningkatan kualitas belanja; (2) peningkatan keandalan aset dan kontinuitas layanan; serta (3) penguatan kapasitas negara untuk menjalankan fungsi keimigrasian di perbatasan. Klaim bahwa efisiensi tersebut telah menghasilkan tambahan ruang fiskal atau peningkatan PNBP harus menunggu bukti dari data anggaran, biaya pemeliharaan, utilisasi aset, dan penerimaan yang dapat diverifikasi.

Model Konseptual

Berdasarkan hasil sintesis, model konseptual penelitian menempatkan standardisasi perencanaan, kualitas data digital, pemeliharaan berbasis kondisi, dan evaluasi pemanfaatan sebagai mekanisme pengelolaan BMN. Mekanisme tersebut diharapkan memperbaiki dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perbaikan kinerja aset kemudian dapat mendukung kesiapan layanan dan pengawasan perbatasan. Adapun dampak

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

terhadap ruang fiskal merupakan kemungkinan yang dimediasi keputusan penganggaran, bukan hubungan otomatis.

Tabel 3. Hubungan Konseptual Pengelolaan BMN, Kinerja Aset, Hasil Layanan, dan Implikasi Ekonomi Pertahanan

Tahap	Hubungan konseptual
Instrumen tata kelola	RKBMN dan SBSK; SAKTI dan rekonsiliasi; pemeliharaan berbasis kondisi; evaluasi pemanfaatan
Kinerja pengelolaan	Kesesuaian kebutuhan, kualitas data, tingkat utilisasi, biaya siklus hidup, dan kesiapan aset
Hasil layanan	Kontinuitas layanan, dukungan pemeriksaan dan pengawasan, serta berkurangnya risiko aset tidak siap
Implikasi ekonomi pertahanan	Kualitas alokasi sumber daya dan dukungan terhadap kapasitas negara; kemungkinan ruang fiskal tetap bergantung pada bukti dan mekanisme anggaran

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi perlu dinilai melalui keseluruhan siklus hidup aset, bukan hanya dari besaran belanja atau keberadaan sistem administrasi. Standardisasi kebutuhan melalui RKBMN dan SBSK, penatausahaan digital, pemeliharaan berdasarkan kondisi, serta evaluasi pemanfaatan aset merupakan mekanisme yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Kinerjanya dipengaruhi oleh kualitas data, keterpaduan perencanaan dan penganggaran, kompetensi pengelola, pengendalian internal, serta kesesuaian keputusan dengan kebutuhan spesifik lokasi.

Dalam kerangka *Value for Money*, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus diperiksa secara bersamaan. Aset yang diperoleh dengan biaya rendah belum tentu efisien jika tidak mendukung layanan; demikian pula, aset yang jarang digunakan tidak otomatis tidak produktif apabila berfungsi sebagai cadangan operasional yang diperlukan. Berdasarkan sumber sekunder yang tersedia, penelitian ini belum dapat menetapkan tingkat efisiensi aktual atau besaran penghematan BMN pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena itu, hasilnya merupakan analisis kebijakan dan literatur, bukan evaluasi empiris atas kinerja aset per satuan kerja.

Efisiensi BMN dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap ekonomi pertahanan melalui peningkatan kualitas belanja publik dan kesiapan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan. Akan tetapi, penghematan tidak otomatis menjadi tambahan anggaran pertahanan atau ruang fiskal yang dapat digunakan. Hal tersebut memerlukan bukti penghematan yang nyata dan berulang serta keputusan alokasi sesuai mekanisme penganggaran negara.

Saran

(1) Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menghubungkan RKBMN dengan rencana strategis, beban layanan, kondisi aset, dan kebutuhan khusus setiap lokasi, termasuk wilayah perbatasan. (2) Pengelola BMN perlu memperkuat pemeriksaan fisik, pembaruan data, rekonsiliasi, dan pengendalian internal agar data digital dapat digunakan sebagai dasar keputusan. (3) Perlu dikembangkan indikator kinerja aset yang mencakup kondisi, tingkat utilisasi, biaya operasi dan pemeliharaan, waktu henti, serta kesiapan operasional. Indikator harus disertai periode pengukuran dan sumber data yang jelas. (4) Penelitian lanjutan sebaiknya menggabungkan studi dokumen dengan wawancara pengelola BMN dan pemeriksaan data pada beberapa satuan kerja, sehingga perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik dapat diuji secara empiris. (5) Setiap klaim penghematan, peningkatan PNBP, atau kontribusi terhadap ruang fiskal perlu didukung data yang dapat diverifikasi dan dibedakan dari potensi manfaat yang masih bersifat konseptual.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, serta pihak-pihak yang mendukung proses akademik dan penelusuran literatur untuk penyusunan kajian ini.

REFERENSI

Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi: Bagaimana kualitas pengelolaan barang milik negara di Indonesia. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis, 6(2), 177–193. https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i2.1529

International Monetary Fund. (2016). Assessing fiscal space: An initial consistent set of considerations. https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/01/13/pp5080-assessing-fiscal-space-an-initial-consistent-set-of-considerations

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Pemasyarakatan Tahun 2025–2029.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
Manurung, R. F., Sembiring, J., & Bandung, Y. (2024). Analisis penumpang dengan integrasi sistem microservice keimigrasian dan machine learning: Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 7(1), 139–163. https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.577
Nurhani, M., & Zen, F. (2023). Hubungan efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara pada kementerian/lembaga. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 8(4), 335–351. https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.654
OECD. (2025). Government at a glance 2025. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Republik Indonesia. (2024b). Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Sandler, T., & Hartley, K. (1995). The economics of defense. Cambridge University Press.
Utomo, B. S., & Martani, D. (2023). Optimalisasi barang milik negara: Penelitian konsep capital charge dalam perspektif peningkatan efisiensi penggunaan aset pemerintah. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 13(3), 789–803. https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.29934
World Bank. (2023). Bringing public assets out of the shadows: Optimizing infrastructure services, unlocking revenues. World Bank Group. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099070623155016874